

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BANDUNG

Galuh Ervianti Putri¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dinas Pendidikan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti rendahnya minat peserta didik dalam mengonsumsi makanan yang disediakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan antar pelaksana program. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Riant Nugroho dengan lima dimensi, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua Tim Kerja Kelembagaan & Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung, kepala sekolah, guru, kepala SPPG, dan orang tua siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala pada setiap dimensi implementasi. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya pedoman teknis, lemahnya monitoring dan evaluasi, rendahnya konsumsi makanan oleh sebagian siswa, keterbatasan fasilitas pendukung, serta pelaksanaan SOP distribusi dan pengawasan yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Makanan Bergizi Gratis, Riant Nugroho, Sekolah Dasar, Kota Bandung.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) policy by the Education Office in Public Elementary Schools in Bandung City. The research was motivated by the continued discovery of various obstacles in program implementation, such as low student interest in consuming the provided food, limited supporting facilities and infrastructure, and suboptimal coordination and supervision between program implementers. This study uses Riant Nugroho's public policy implementation theory with five dimensions, namely appropriate policy, appropriate implementer, appropriate target, appropriate environment, and appropriate process.

The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of the Head of the Institutional & Student Working Team of Elementary Schools in the Bandung City Education Office, principals, teachers, heads of SPPG, and parents of students. The results of the study indicate that the implementation of the MBG program has been running, but still faces various obstacles in each dimension of implementation. These obstacles include suboptimal technical guidelines, weak monitoring and evaluation, low food consumption by some students, limited supporting facilities, and less than optimal implementation of distribution and supervision SOPs. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, supervision, and continuous evaluation so that the MBG program can run more effectively and on target.

Keywords: Policy Implementation, Free Nutritious Food, Riant Nugroho, Elementary School, Bandung City.

PENDAHULUAN

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gizi anak usia sekolah yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Anak usia sekolah dasar termasuk kelompok yang rentan mengalami masalah kekurangan gizi karena berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang. Pemenuhan gizi yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik anak, tetapi juga terhadap kemampuan konsentrasi, daya pikir, dan prestasi belajar peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik secara lebih merata melalui Program MBG.

Pelaksanaan program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Gizi Nasional menetapkan Makanan Bergizi Gratis sebagai salah satu strategi nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Program Makanan Bergizi Gratis pada tahap awal implementasi kebijakan. Pelaksanaan program ini didukung melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 521/Kep.1060-DKPP/2025 tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Makanan Bergizi Gratis. Kebijakan tersebut

menjadi landasan pelaksanaan program MBG di sekolah dasar negeri Kota Bandung. Secara umum, implementasi program telah berjalan dan mampu menjangkau ribuan peserta didik sekolah dasar di beberapa kecamatan. Namun demikian, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Secara umum, Program MBG memberikan manfaat bagi peserta didik karena membantu pemenuhan kebutuhan makanan selama berada di sekolah. Program ini juga dinilai mampu mendukung konsentrasi belajar siswa dan membantu orang tua dalam mengurangi pengeluaran konsumsi harian anak, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Selain memiliki fungsi kesehatan, program ini juga memiliki fungsi sosial karena dapat membantu mengurangi kesenjangan pemenuhan gizi pada anak usia sekolah.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program MBG di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Permasalahan yang ditemukan antara lain masih rendahnya minat sebagian peserta didik dalam mengonsumsi makanan yang disediakan, variasi menu yang kurang sesuai dengan preferensi siswa, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar pelaksana program. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi program juga belum berjalan secara maksimal sehingga pengawasan terhadap kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) masih memerlukan perbaikan.

Permasalahan implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bagi peserta didik, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, kesiapan pelaksana, ketepatan sasaran program, dukungan lingkungan, dan efektivitas proses pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya dilihat dari tujuan kebijakan yang telah dirumuskan, tetapi juga dari kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi tahap penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pemerintah.

Menurut Riant Nugroho, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima dimensi utama, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Dimensi tepat kebijakan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan terhadap masalah yang dihadapi. Dimensi tepat pelaksana menilai kemampuan aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dimensi tepat target berkaitan dengan kesesuaian sasaran penerima manfaat program. Dimensi tepat lingkungan menilai dukungan lingkungan terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan dimensi tepat proses berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kebijakan terhadap prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Kelima dimensi tersebut menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi Program MBG telah berjalan secara efektif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBG tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis distribusi makanan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi pelaksana, dukungan lingkungan sekolah, serta efektivitas proses koordinasi antar aktor kebijakan.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas program MBG terhadap peningkatan status gizi dan prestasi belajar siswa. Namun, penelitian mengenai implementasi kebijakan MBG oleh Dinas Pendidikan di tingkat sekolah dasar negeri masih terbatas, khususnya di Kota Bandung. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis oleh Dinas Pendidikan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung menggunakan teori implementasi kebijakan dari Riant Nugroho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan MBG dilaksanakan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di sekolah dasar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dinas Pendidikan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. Objek penelitian berfokus pada pelaksanaan kebijakan MBG di SDN 136 Sukawarna dan SDN 096 Sarijadi Selatan sebagai sekolah penerima program. Subjek penelitian terdiri dari Ketua Tim Kerja Kelembagaan & Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung, kepala sekolah, guru, pihak SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), serta orang tua siswa yang terlibat dalam pelaksanaan program. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan MBG.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, alat dokumentasi, serta catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan MBG serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di lingkungan sekolah dasar negeri Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Program MBG merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga bertujuan mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, dan produktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan program memerlukan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, sekolah, hingga penyedia makanan.

Pelaksanaan Program MBG di Kota Bandung melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari Dinas Pendidikan, pihak sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga SPPG sebagai penyedia makanan. Dinas Pendidikan berperan dalam melakukan koordinasi, monitoring, dan pengawasan program. Pihak sekolah bertanggung jawab dalam membantu penerimaan, pendistribusian, serta pengawasan makanan kepada siswa. Sementara itu, pihak penyedia makanan bertugas menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan sesuai ketentuan program. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program MBG membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif.

Implementasi Program MBG secara umum telah berjalan dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Program ini membantu siswa memperoleh asupan makanan selama berada di sekolah, khususnya bagi siswa yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Beberapa guru menyampaikan bahwa setelah adanya Program MBG, siswa terlihat lebih fokus dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, program juga dinilai membantu orang tua siswa dalam mengurangi pengeluaran konsumsi harian anak, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Permasalahan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis distribusi makanan, tetapi juga mencakup kualitas makanan, variasi menu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi antar pelaksana program. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan siswa yang tidak menghabiskan makanan karena faktor rasa, jenis makanan, dan kebiasaan makan siswa di rumah. Variasi menu yang dianggap kurang menarik menyebabkan beberapa siswa merasa bosan terhadap makanan yang diberikan. Selain itu, keterbatasan fasilitas sekolah seperti ruang penyimpanan makanan, tempat pencucian alat makan, dan fasilitas sanitasi juga menjadi hambatan dalam mendukung pelaksanaan program secara optimal.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi program. Pengawasan terhadap kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) masih perlu ditingkatkan. Evaluasi program juga belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh sehingga beberapa kendala di lapangan sering kali baru ditangani setelah muncul laporan atau keluhan dari sekolah maupun orang tua siswa. Di sisi lain, koordinasi antar pelaksana program memang telah berjalan melalui komunikasi langsung maupun grup WhatsApp, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan hambatan komunikasi terkait perubahan menu, keterlambatan distribusi, dan penanganan masalah teknis lainnya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung pada dasarnya telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan berbagai perbaikan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bagi siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, kesiapan pelaksana, ketepatan sasaran program, dukungan lingkungan, dan efektivitas proses pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan implementasi kebijakan Program MBG dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho yang meliputi dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program MBG telah berjalan serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung.

a. Tepat kebijakan

Dimensi tepat kebijakan berkaitan dengan kesesuaian substansi kebijakan dengan masalah yang hendak diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan status gizi peserta didik, mendukung kesehatan

anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membantu menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Program ini juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi anak usia sekolah dasar.

Pelaksanaan program MBG di Kota Bandung telah mengacu pada standar teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional melalui petunjuk teknis terkait penyusunan menu dan pembagian porsi makanan sesuai kelompok usia peserta didik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah dirancang berdasarkan kebutuhan gizi siswa sekolah dasar. Selain berorientasi pada kesehatan, program MBG juga memiliki fungsi sosial karena membantu peserta didik dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dalam memperoleh asupan makanan bergizi di sekolah.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala. Kebijakan MBG belum sepenuhnya mengakomodasi faktor non-teknis seperti kebiasaan makan, selera, dan preferensi siswa terhadap jenis makanan tertentu. Akibatnya, masih ditemukan peserta didik yang tidak menghabiskan makanan yang diberikan meskipun kandungan gizinya telah sesuai standar. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian menu dan kualitas makanan yang kurang menarik bagi siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya pada aspek fleksibilitas menu dan pengawasan kualitas makanan.

Dengan demikian, dimensi tepat kebijakan dalam implementasi MBG dapat dikatakan telah berjalan cukup baik karena memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, diperlukan evaluasi menu secara berkala, penyesuaian makanan sesuai preferensi siswa, serta penguatan pengawasan kualitas makanan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan MBG sudah tepat secara konsep karena sesuai dengan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi dalam implementasinya masih memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik dan kebiasaan makan siswa agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

b. Tepat Pelaksana

Dimensi tepat pelaksana menilai kesesuaian aktor pelaksana dengan tugas, kewenangan, dan kapasitas dalam menjalankan kebijakan. Pelaksanaan Program MBG melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan Kota Bandung, pihak sekolah, guru, penyedia makanan atau SPPG, serta dukungan dari orang tua siswa. Masing-masing pelaksana telah menjalankan perannya sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Koordinasi antar pelaksana dilakukan melalui komunikasi formal dan informal, seperti grup WhatsApp, pelaporan berkala, dan koordinasi langsung ketika terjadi kendala di lapangan. Pola komunikasi tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang cukup responsif antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan SPPG. Ketika terjadi keluhan terkait menu, jumlah makanan, atau keterlambatan distribusi, informasi dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Pada aspek kapasitas pelaksana, pihak sekolah maupun SPPG menunjukkan kesiapan yang cukup baik. SPPG telah melakukan proses seleksi tenaga kerja berdasarkan kompetensi dan memberikan pelatihan teknis sebelum operasional dimulai. Selain itu, pembagian tugas di sekolah juga telah berjalan secara jelas dan terstruktur melalui pembagian peran antara kepala sekolah, guru kelas, guru piket, dan tenaga kependidikan lainnya.

Namun demikian, hambatan utama dalam dimensi tepat pelaksana masih terletak pada belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi masih bersifat situasional dan dilakukan ketika muncul kendala tertentu. Selain itu, pencatatan formal mengenai keluhan siswa, tingkat konsumsi makanan, serta kualitas distribusi belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan yang sama berpotensi terulang karena belum adanya data evaluasi yang kuat sebagai dasar perbaikan program.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pada dimensi tepat pelaksana dapat dikatakan sudah cukup baik karena pelaksana telah menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan dan evaluasi program yang lebih terstruktur melalui forum evaluasi berkala, sistem pelaporan resmi, dan

koordinasi formal antar pelaksana agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Tepat Target

Dimensi tepat target berkaitan dengan kesesuaian sasaran penerima manfaat program. Dalam implementasi MBG, sasaran penerima manfaat telah ditentukan secara jelas, yaitu peserta didik sekolah dasar sebagai kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi untuk mendukung pertumbuhan dan proses belajar. Penentuan siswa sekolah dasar sebagai penerima manfaat dinilai telah sesuai dengan tujuan kebijakan karena anak usia sekolah merupakan kelompok yang rentan mengalami permasalahan gizi.

Program MBG juga telah memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi harian dan mendukung aktivitas belajar di sekolah. Selain itu, program ini turut membantu keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi anak.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan peserta didik yang belum mengonsumsi makanan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan makan, preferensi terhadap jenis makanan tertentu, serta kurangnya minat siswa terhadap variasi menu yang disediakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sasaran program belum sepenuhnya tercapai karena makanan yang telah disediakan tidak seluruhnya dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dengan demikian, dimensi tepat target dalam implementasi MBG telah berjalan cukup baik karena sasaran penerima manfaat sudah sesuai dengan kelompok yang membutuhkan. Akan tetapi, efektivitas program masih memerlukan penyesuaian menu dan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik peserta didik agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai secara optimal.

d. Tepat Lingkungan

Dimensi tepat lingkungan berkaitan dengan dukungan lingkungan sekolah, orang tua, dan kondisi sarana prasarana terhadap implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Program MBG, dukungan dari pihak sekolah

dan orang tua pada dasarnya sudah cukup baik. Sekolah berperan aktif dalam membantu distribusi makanan, pengawasan konsumsi siswa, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya makanan bergizi.

Pada dimensi tepat lingkungan, dukungan dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa secara umum sudah cukup baik. Dinas Pendidikan menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi melalui komunikasi aktif dengan sekolah dan penyedia makanan. Pihak sekolah juga menunjukkan keterbukaan terhadap masukan dari siswa maupun orang tua terkait kualitas makanan yang diberikan.

Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang mempengaruhi kualitas penyimpanan dan distribusi makanan. Selain itu, respon peserta didik terhadap makanan yang diberikan juga belum sepenuhnya positif karena dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi dan preferensi makanan masing-masing siswa. Selain itu, orang tua siswa juga masih memiliki kekhawatiran terhadap kebersihan dan keamanan makanan, terutama saat cuaca panas yang dapat mempengaruhi kualitas makanan. Perbedaan fasilitas antar sekolah menunjukkan bahwa kesiapan lingkungan pelaksanaan program belum merata.

Dengan demikian, dimensi tepat lingkungan dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang mempengaruhi efektivitas implementasi program. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan dukungan lingkungan melalui peningkatan fasilitas pendukung sekolah, penguatan edukasi gizi kepada peserta didik, serta peningkatan keterlibatan orang tua dalam mendukung keberhasilan program MBG. Dengan dukungan lingkungan yang lebih baik, implementasi program akan lebih mudah diterima dan berjalan secara optimal.

e. Tepat Proses

Dimensi tepat proses berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan prosedur, mekanisme, komunikasi, dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program MBG telah memiliki alur pelaksanaan yang cukup jelas mulai dari penerimaan makanan, distribusi di sekolah, hingga

pengawasan konsumsi peserta didik. Komunikasi antar pelaksana juga telah berjalan melalui koordinasi rutin dan media komunikasi daring.

Pelaksanaan Program MBG telah memiliki tahapan pelaksanaan yang cukup jelas mulai dari perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga evaluasi program. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan sekolah dan SPPG melalui briefing, grup WhatsApp, dan monitoring lapangan. Kepala sekolah juga melakukan pengawasan secara langsung mulai dari proses penerimaan makanan hingga pengembalian perlengkapan distribusi.

Namun demikian, proses implementasi masih menghadapi beberapa kelemahan, seperti evaluasi yang belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta belum optimalnya pelaksanaan SOP terkait pengawasan kualitas makanan dan distribusi program. Evaluasi masih dilakukan ketika muncul kendala tertentu sehingga proses perbaikan program belum berjalan secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dimensi tepat proses masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi berkala, penguatan SOP, dan koordinasi lintas pelaksana agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, masih terdapat dominasi beban pelaksanaan pada pihak sekolah, terutama guru yang turut bertanggung jawab dalam distribusi dan pengawasan makanan di kelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program masih membutuhkan penguatan koordinasi lintas lembaga agar pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada sekolah sebagai pelaksana utama.

Dengan demikian, dimensi tepat proses dalam implementasi MBG dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik karena tahapan dasar pelaksanaan telah sesuai prosedur. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan evaluasi formal, digitalisasi pelaporan, serta peningkatan kepatuhan terhadap SOP agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung pada dasarnya telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung aktivitas pembelajaran di sekolah. Implementasi program juga menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, sekolah, guru, SPPG, hingga orang tua siswa yang telah menjalankan perannya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program. Ditinjau dari dimensi tepat kebijakan, program MBG telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik karena berorientasi pada peningkatan status gizi dan kesehatan siswa. Pada dimensi tepat pelaksana, koordinasi antar pelaksana telah berjalan melalui komunikasi dan pembagian tugas yang cukup jelas. Pada dimensi tepat target, sasaran program telah sesuai, yaitu peserta didik sekolah dasar sebagai kelompok yang membutuhkan pemenuhan gizi. Pada dimensi tepat lingkungan, dukungan sekolah dan orang tua terhadap program sudah cukup baik meskipun masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, pada dimensi tepat proses, tahapan pelaksanaan program telah berjalan sesuai prosedur, namun pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan program masih belum optimal. Berbagai kendala yang ditemukan dalam implementasi program meliputi rendahnya minat sebagian siswa terhadap makanan yang disediakan, variasi menu yang kurang sesuai dengan preferensi siswa, keterbatasan fasilitas pendukung sekolah, serta sistem evaluasi dan pengawasan yang belum berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pelaksana, peningkatan kualitas dan variasi menu makanan, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin agar implementasi Program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Policy, P. (2023). *Riant Nugroho*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*. CV. Mitra Ilmu.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Ikka Febryanti, I. M. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) (STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 7, Issue, 69-70*.
- Irawan Hadi Wiranata, A. Y. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Strategi Peningkatan Gizi dan Kualitas Pendidikan di SDN 13 Cempaka Pekanbaru. *Deep Learning berbasis Kearifan Lokal: Mewujudkan Pendidikan Berdampak yang Humanis dan Visioner*, 315-316.
- Izzan Muhammad Furkan, R. A. (2025). Mewujudkan Makan Bergizi Gratis: Perspektif Guru SD Dalam Implementasi Kebijakan. *Manajemen Pendidikan Vol. 10, No. 3*, 922-924.
- Natalia Desiani, A. S. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN GRATIS PADA STATUS GIZI SISWA. *MANUJU: MALAHAYATI NURSING JOURNAL, VOLUME 7 NOMOR 1 TAHUN 2025*, 30-31.